

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ciptaan batik pada awalnya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang berwujud di berbagai daerah, seperti seni songket, tenun ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.<sup>1</sup> Menurut terminologinya, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna.<sup>2</sup> Sementara berdasarkan *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, seni batik merupakan suatu seni tradisional asli Indonesia dalam menghias kain dan bahan lain dengan motif hiasan dan pewarna khusus. Selain itu batik dikenakan sebagai pakaian bawahan oleh banyak suku di Indonesia, terutama suku-suku di Pulau Jawa.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan bentuk dan fungsinya, batik tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja, tetapi dapat dipergunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi, bahkan merambah ke barang-barang mebel. Oleh karena itu, batik sebagai produk budaya yang dibutuhkan untuk kepentingan

---

<sup>1</sup>Eddy Damian, dkk (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni, Bandung, 2002, hlm.101

<sup>2</sup> A.N. Suyanto, *Sejarah Batik Yogyakarta*, Merapi, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.; bandingkan dengan Endik S., *Seni Membatik*, Safir Alam, Jakarta, 1986, hlm. 10.

<sup>3</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 206.

budaya tradisional dan untuk kepentingan modern telah menghasilkan berbagai bentuk produk batik yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu dapat dilihat dari aspek bentuk desain/motif dan teknik produksinya.

Selain batik yang dibuat dengan cara tradisional, yakni ditulis dengan tangan, ada pula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik modern. Dengan demikian, kini terdapat dua pengertian mengenai seni batik, yakni : tradisional dan modern. Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi, dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, misalnya ciri khas ragam hias batik dari daerah Solo yang menciptakan suatu ragam hias dengan pesan dan harapan yang tulus dan luhur semoga membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi si pemakai. Sementara batik modern mencerminkan bentuk motif, fungsi, dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.

Apabila pengertian seni batik tradisional dan modern tersebut dipilih kembali, maka menurut macamnya kain batik terdiri atas tiga, yaitu:<sup>4</sup>

1. Kain batik tulis yang dianggap paling baik dan paling tradisional;
2. Kain batik cap; dan
3. Kain batik yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap yang biasanya disebut batik kombinasi.

Guna kelancaran perdagangan berbagai jenis batik, baik di dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor, sejak dahulu pemerintah telah menetapkan bahwa semua batik yang dipasarkan harus memakai merek dan label. Ketetapan

---

<sup>4</sup> R.M. Ismunandar, *Teknik & Mutu Batik Tradisional - Mancanegara*, Dahara Prize, Semarang, 1985, hlm. 17-18.

in dimaksudkan untuk melindungi kepentingan baik produsen maupun konsumen. Setiap batik yang ditulis tangan, bagian tepinya harus terdapat tulisan "Batik Tulis", sedangkan pada batik cap harus terdapat tulisan "Batik Cap". Begitu pula tekstil yang bermotif batik, pada pinggirannya harus mencantumkan tulisan "Tekstil Motif Batik".

Melalui ketentuan ini diharapkan para konsumen yang bukan ahli dalam masalah batik, tidak akan salah pilih. Begitu pula produsen batik, terutama pengusaha kecil yang umumnya pengrajin batik tradisional, diharapkan dapat dilindungi dari ulah para pembajak yang biasanya bermodal lebih besar dan kuat. Sebenarnya ada berbagai cara yang telah ditempuh pemerintah dalam upaya melestarikan budaya batik, antara lain dengan mengharuskan pengenaan pakaian seragam batik bagi anak-anak sekolah pada hari-hari tertentu. Begitu juga bagi pegawai negeri, melalui Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) diharuskan mengenakan kemeja batik lengan panjang pada setiap tanggal 17 Agustus dan hari-hari besar nasional. Baju batik Korpri yang berwarna biru merupakan seragam resmi organisasi tersebut.

Usaha yang dilakukan pemerintah mengenai keharusan berseragam batik itu walaupun bertujuan baik, namun menurut penulis agak kurang mengena, sebab batik yang dikenakan sebagai pakaian seragam tersebut hampir selalu merupakan produk pabrik. Dengan demikian peraturan tersebut sama sekali belum menyentuh para pengrajin batik tradisional, terutama pengrajin batik tulis. Sementara itu bimbingan dan pengarahan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan juga lebih banyak diarahkan untuk menyehatkan usaha batik

berskala besar. Begitu pula halnya dalam bantuan permodalan yang hingga kini belum mengarah pada pengrajin terutama yang berada di daerah pedesaan.

Namun demikian upaya untuk melestarikan seni batik khususnya batik tradisional tidak cukup hanya demikian. Hal yang paling mendasar adalah upaya memberikan penghargaan berupa perlindungan bagi para pembatik atas hasil karya intelektualnya melalui karya seni batik. Perlindungan bagi karya seni batik ini dapat diberikan melalui hak cipta sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Hal ini penting karena dalam proses menghasilkan suatu karya seni batik diperlukan sejumlah pengorbanan baik pikiran, tenaga, biaya, dan waktu. Pengorbanan ini jauh lebih terasa pada proses menghasilkan batik tradisional yang pada umumnya ditulis dengan tangan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain, adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs-WTO). Persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual. Di samping itu, TRIPs-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HAKI).

Tujuan utama persetujuan TRIPs-WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HAKI dan untuk menjamin

bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HAKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Mengapa HAKI, khususnya hak cipta perlu diberikan perlindungan dan diberikan penghargaan terhadap karya-karya tulis, seni, sastra dan ilmu pengetahuan ? Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.

Untuk lebih menyesuaikan ketentuan dalam TRIPs-WTO khususnya yang berhubungan dengan hak cipta, maka Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002). Undang-undang ini diterbitkan untuk mengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yang dianggap belum terlalu memenuhi norma dan standar TRIPs-WTO.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 Ayat (1) huruf (i) UUHC 2002 menetapkan bahwa, "Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup seni batik."

Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka hak cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) UUHC 2002, yaitu: "Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi

milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya."

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UUHC 2002 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *folklor* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

Sebenarnya perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak UUHC 1982, UUHC 1997 hingga UUHC 2002. Namun UUHC tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik. Hal ini penting karena ketidakjelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya.<sup>11</sup> Terlebih lagi apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak.

Selain ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik. Sistem pendaftaran hak cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif, dan bukan bersifat konstitutif. Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan, melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa.

Faktor lainnya adalah mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya para pengrajin batik. Padahal tidak seluruh pembatik merupakan pengusaha yang bermodal besar.

Menjadi tugas dan kewajiban pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Sekalipun tidak sebesar hasil industri lainnya namun seni batik secara historis yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi pembajakan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun oleh pengusaha-pengusaha dari Negara lain, seperti Malaysia yang telah memiliki hak cipta bagi batik tradisional yang sebetulnya milik bangsa Indonesia.

Khusus bagi seni batik tradisional, hal ini terkait dengan ketentuan *Traditional Knowledge* (selanjutnya disebut TK). Berdasarkan pada *Convention on Biological Diversity* (selanjutnya disebut CBD), definisi TK adalah pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli.<sup>5</sup> Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa TK adalah pengetahuan yang status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Achmad Zen Umar Purba, "Traditional Knowledge: Subject Matter For Which Intellectual Property Protection Is Sought", artikel dalam *WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues*, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001, hlm. 33.

<sup>6</sup> Henry Soelistyo Budi, "Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HKI", makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan HAKI Terhadap Inovasi Teknologi

Untuk definisi TK, *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya WIPO) menggunakan istilah ini untuk menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, performansi, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan "berbasis tradisi" menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, dan dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya. Pada umumnya telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus berkembang sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah.

Tidak seperti kepemilikan HAKI pada umumnya yang bersifat privat, maka kepemilikan TK masyarakat bersifat kolektif dan komunal. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa setiap generasi harus menjaga dan menyimpan TK tersebut dengan hati-hati secara turun temurun. Karena sifatnya tersebut maka TK belum memiliki perlindungan berupa kepemilikan berdasarkan sistem hukum. Maksudnya bahwa perlindungan bagi TK belum memiliki sistem perlindungan hukum yang tepat.

Khusus di Indonesia, mengenai perlindungan bagi TK ini sebaiknya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Undang-undang ini mengatur tentang otonomi yang diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah. UU Pemda

---

Tradisional di Bidang Obat, Pangan & Kerajinan, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola & Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001, hlm. 2.



juga berpengaruh terhadap keberadaan TK terutama apabila menyangkut wilayah keberadaan TK yang bersangkutan. Selain itu UU Pemda juga akan berpengaruh pada pihak yang akan mewakili TK tersebut.

Melalui perlindungan hak cipta seni batik tradisional yang juga mencakup TK, bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yaitu terciptanya keseimbangan kepentingan antara pencipta karya seni batik dengan kepentingan masyarakat lainnya. Dengan demikian diharapkan hasil-hasil kreasi budaya bangsa Indonesia, termasuk seni batik tradisional, dapat eksis dan memberikan peluang untuk bersaing di era globalisasi.

Mendasarkan pada uraian tersebut diatas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah dalam perlindungan karya cipta batik adalah belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta batik dan pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat tergolong dalam cipta pribadi. Selain itu juga adanya pabrik-pabrik batik seperti Batik Solo dan Danarhadi juga memiliki karya seni batik yang diproduksi untuk diperjualbelikan. Pada kenyataannya masih banyak pencipta motif batik di Kota Solo yang tidak mendasarkan hak ciptanya untuk dilegalisasi sebagai hak cipta pribadi, sehingga sangat sulit untuk mengetahui pencipta motif batik yang dihasilkan secara perseorangan.

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian mengenai Kajian Hukum Mengenai Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia sebagaimana disinggung di muka, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum tentang perlindungan Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional.
  - b. Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang pelaksanaan hukum perlindungan Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan

Intelektual Tradisional di tengah-tengah kondisi perekonomian yang terus mengalami perkembangan.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para pengusaha, hakim pengadilan negeri, notaris, penasehat hukum atau advokat khususnya maupun pengrajin batik dalam menghadapi kasus-kasus perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional.

## E. Metode Pendekatan

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan perlindungan batik yang ada di lapangan.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini mengemukakan masalah perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional dan kendala-kendala yang terjadi pada perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional serta bagaimana mencari solusinya. Untuk itu digunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 40.

yang terjadi di Kota Solo yang dikaitkan dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-undang Hak Cipta.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.<sup>8</sup> Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional yang dikaitkan dengan implementasi *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Undang-undang Hak Cipta.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data primer diperoleh dari :

---

<sup>8</sup> Soedjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1982), halaman 10

- a. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo
- b. Pengusaha Batik di Kota Solo

Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan Batik Solo yaitu Undang-undang no. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten dengan perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab

secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan proses wawancara dapat terkontrol.<sup>9</sup>

b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional.
- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

## 5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai perlindungan hukum Karva Tradisional Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional serta kendala-kendala yang terjadi pada perlindungan hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional dan solusi yang dibutuhkan dalam mengatasi kendala tersebut.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research*, Jilid II. Yogyakarta : Andi, hal. 207.

tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>10</sup>

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

---

<sup>10</sup> *Ibid.* halaman 12.

## BAB II : LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
2. Prinsip-prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
3. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual

### B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Ruang Lingkup Hak Cipta
3. Hak-hak Yang Tercakup Dalam Hak Cipta
4. Sifat-sifat Hak Cipta
5. Pendaftaran dan Pembatalan Hak Cipta
6. Pengalihan Hak Cipta

### C. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional
2. Lingkup Perlindungan Pengetahuan Tradisional
3. Konsep Kepemilikan Pengetahuan Tradisional
4. Manfaat Perlindungan Pengetahuan Tradisional

### D. Tinjauan Umum Tentang Batik

1. Pengertian Batik
2. Perkembangan Batik di Indonesia
3. Jenis Batik



4. Proses Pembuatan Batik Tradisional

5. Batik Tradisional di Kota Surakarta

### BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Perkembangan Batik Di Surakarta

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta.

2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta.

2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta

### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran